

ANALISIS PROBLEMATIKA DATABASE NIB IKM KABUPATEN PAMEKASAN: STRATEGI ESKALASI UNTUK PENINGKATAN EKONOMI DAERAH

Istianah Asas¹

Universitas Madura

istianahasas@gmail.com

Wahyu Maulana^{2*}

Universitas Madura

maulana_why@unira.ac.id

Diterima 27 September 2025

Disetujui 25 Desember 2025

Abstract The problems of Small and Medium Industries (SMEs) in Pamekasan Regency, East Java, particularly related to data collection and business escalation, have remained unresolved over the past decade. This situation is inconsistent with the government's priority of placing the creative economy sector as a focus of national economic development. The main problem is the incomplete data collection of SMEs through the Business Identification Number (NIB). This has resulted in hampered SME scale-up programs, difficulties in monitoring, and inaccurate policy decision-making. This study analyzes the problems of the SME NIB database using a qualitative approach using QDA Miner Lite software to identify the root causes and patterns of business escalation. The study involved 39 SMEs out of a total of 107 registered SMEs in Pamekasan Regency, selected purposively based on their low-risk characteristics. Data were collected through in-depth interviews and field observations using a qualitative approach. The study identified that 32.38% of SMEs experienced obstacles in NIB renewal due to a lack of technical understanding and access to information. Meanwhile, 35.9% of SMEs successfully scaled up through business digitalization, innovative and superior products, and competitive businesses, which contributed to a 69.23% increase in the regional economy. This study recommends the Pamekasan Regency Government to: 1. Provide regular NIB renewal training; 2. Build an integrated digital monitoring system; and 3. Design a scale-up mentoring program based on NIB data to improve policy effectiveness and the welfare of SMEs.

Keywords: IKM Escalation; QDA Miner; NIB Database; Regional Economy

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui pembentukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2019 menunjukkan komitmen serius terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif. Sektor ini berkontribusi 7,44% terhadap PDB nasional dan diproyeksikan meningkat 8,37% pada periode 2024-2029 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020; Kemenparekraf, 2020). Dari semangat tersebut menjadikan sektor ekonomi kreatif yang ada di daerah harus ditingkatkan dan dikembangkan guna mendorong perekonomian daerah yang berdampak terhadap pertumbuhan PDB nasional. Hal ini juga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif seperti UMKM dan IKM.

Kabupaten Pamekasan mengalami transformasi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,88% dengan PDRB ADHB mencapai 22,5 triliun pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025a). Pemerintah Kabupaten Pamekasan menargetkan peningkatan sektor ekonomi kreatif, khususnya UMKM dan IKM sebagai penggerak ekonomi lokal. Berdasarkan data Disperindag Kabupaten Pamekasan tahun 2024, jumlah IKM di Pamekasan mencapai 1.371 unit usaha dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 7,74% (Badan Pusat Statistik (BPS), 2025b). Namun, Kabupaten Pamekasan menghadapi kendala signifikan dalam pendataan IKM. Berdasarkan data Disperindag Kabupaten Pamekasan tahun 2024, hanya 68,05% dari total IKM yang terdaftar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) aktif. Kondisi ini menghambat pemerintah daerah dalam: (1) memetakan potensi IKM, (2) merancang program pendampingan yang tepat sasaran, dan (3) mengalokasikan anggaran secara efektif.

Penelitian terdahulu tentang pengembangan IKM berfokus pada aspek pemasaran digital (Sulistyono et al., 2023), pemberdayaan (Zainuddin et al., 2024), dan kinerja operasional (Tasya et al., 2022), namun belum mengeksplorasi peran sistem database terintegrasi sebagai instrumen strategis untuk eskalasi IKM dan monitoring kebijakan. Novelty: Penelitian ini mengintegrasikan analisis database NIB dengan strategi eskalasi IKM menggunakan pendekatan kualitatif berbasis QDA Miner Lite untuk mengidentifikasi pola permasalahan dan merumuskan model intervensi struktural.

Penelitian pengembangan IKM dapat dikategorikan dalam empat aspek : 1. Aspek SDM : Penelitian menunjukkan pentingnya kompetensi manajerial (Febrila & Eriyanti, 2025) dan kapabilitas teknis (Zare et al., 2025) dalam meningkatkan daya saing IKM; 2. Aspek Produk dan Inovasi : Kualitas produk (Aruvali et al., 2025), Mutu produk (Abbas et al., 2023) dan inovasi berkelanjutan (Ruslan et al., 2025) terbukti signifikan meningkatkan penetrasi pasar; 3. Aspek Pemasaran dan branding : Transformasi digital marketing (Mareta et al., 2025) dan branding (Qisthani et al., 2023) menjadi strategi utama perluasan pasar IKM; dan 4. Aspek Finansial dan Kebijakan : Pengelolaan keuangan (Fera et al., 2025), akses permodalan (Ayuni, 2024) dan dukungan kebijakan pemerintah (Abu et al., 2025) menjadi enabler pertumbuhan. Namun, belum ada penelitian yang menganalisis peran database terintegrasi sebagai fondasi monitoring dan eskalasi IKM secara sistematis. Ketimpangan akses program IKM menghambat pencapaian target ekonomi daerah dan berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi antar pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan berbagai program pendampingan IKM seperti : diadakannya berbagai macam pelatihan, digitalisasi, informasi pasar hingga bantuan material. Namun, evaluasi menunjukkan hanya 51,28% dari total IKM yang mendapat manfaat program (Disperindag, 2024). Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya sistem monitoring berbasis data untuk memastikan pemerataan program. Terdapat beberapa rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, diantaranya : 1. Apa faktor penyebab rendahnya kepemilikan NIB aktif di kalangan IKM Kabupaten Pamekasan?; 2. Bagaimana pola eskalasi IKM yang berhasil scale up di tengah keterbatasan sistem database?; dan 3. Bagaimana model intervensi berbasis database dapat meningkatkan efektivitas program pengembangan IKM?. Dari rumusan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengidentifikasi problematika sistem database NIB dalam ekosistem IKM Pamekasan; 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan eskalasi IKM; dan 3. Merumuskan model monitoring dan evaluasi berbasis database untuk mendukung program scale up IKM.

Penelitian ini melibatkan kolaborasi multipihak antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kabupaten Pamekasan untuk memastikan implementasi hasil penelitian yang terintegrasi. Penelitian ini berkontribusi dalam tiga aspek : 1. Teoritis - memperkaya literatur tentang peran database dalam ekosistem IKM; 2. Praktis - menyediakan model intervensi berbasis data untuk pemerintah daerah; dan 3. Kebijakan - merumuskan rekomendasi konkret untuk optimalisasi program pengembangan IKM yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

1.2 Tinjauan Literatur

1. IKM

Industri Kecil Menengah (IKM) didefinisikan sebagai unit usaha dengan tenaga kerja 5-19 orang untuk industri kecil dan 20-99 orang untuk industri menengah (UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian). IKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia melalui : 1. Kontribusi terhadap PDB sebesar 3,69%; 2. Penyerapan tenaga kerja mencapai 13,11 juta orang; dan 3. Menjadi inkubator kewirausahaan dan inovasi produk local (Fauzan, 2025). Salah satu manifestasi keterbatasan teknologi adalah sistem pendataan IKM yang belum terintegrasi. Database yang komprehensif dan terintegrasi menjadi krusial sebagai instrumen: (1) pemetaan potensi dan kapasitas IKM; (2) basis monitoring dan evaluasi program pemberdayaan; (3) dasar pengambilan keputusan kebijakan yang berbasis bukti; dan (4) sarana fasilitasi akses IKM terhadap program pemerintah, permodalan, dan peluang pasar (OECD, 2023). Di Indonesia, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi database utama yang mengintegrasikan perizinan dan identitas pelaku usaha dalam sistem Online Single Submission (OSS). Meskipun menghadapi berbagai kendala, IKM memiliki peluang strategis untuk meningkatkan daya saing. Transformasi digital melalui adopsi e-commerce, digital marketing dan sistem manajemen berbasis cloud dapat meningkatkan jangkauan pasar hingga 50,2% (Kano et al., 2022). Selain itu, model kolaborasi dengan perusahaan besar melalui skema kemitraan rantai pasok terbukti meningkatkan akses pasar dan transfer teknologi (Ruslan et al., 2025).

2. Database NIB

Database adalah sistem terorganisir untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi secara terstruktur yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data (Elmasri & Navathe, 2015). Dalam konteks pengembangan IKM, database berfungsi sebagai instrumen strategis untuk : (1) Pemetaan profil dan kapasitas usaha; (2) Monitoring kinerja dan perkembangan IKM; (3) Basis evaluasi efektivitas program pemberdayaan; dan (4) Fasilitasi akses IKM terhadap layanan pemerintah dan peluang bisnis. Sistem database yang terintegrasi memungkinkan berbagai stakeholder (pemerintah daerah, lembaga keuangan, asosiasi industri) mengakses informasi IKM secara real-time untuk koordinasi program pemberdayaan, verifikasi kelayakan kredit dan identifikasi peluang kemitraan (OECD, 2023). Di Indonesia, pemerintah mengimplementasikan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai platform terintegrasi untuk perizinan berusaha. Melalui OSS, setiap pelaku usaha termasuk IKM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai: (1) Identitas pelaku usaha; (2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); (3) Angka Pengenal Importir (API); dan (4) Akses terhadap izin berusaha lainnya (Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021). NIB menjadi kunci akses IKM terhadap berbagai program pemerintah, skema pembiayaan dan peluang pasar. Sistem NIB dalam OSS mencatat berbagai informasi krusial IKM meliputi: identitas pelaku usaha, NPWP, nomor NIB, jenis perusahaan

hingga status NIB. Gambar 1 dan 2 dibawah ini menunjukkan struktur data NIB yang relevan untuk monitoring IKM di Kabupaten Pamekasan.

The image contains two side-by-side screenshots of a web application interface. Both screenshots have a header with the logo of the Republic of Indonesia, the text 'OSS' (Online Service System), and several menu items: BERANDA, PELAPORAN, PEMROSESAN PERIZINAN, PENGADUAN, PENCABUTAN, PELACAKAN, and PROFILE.

Gambar 1. NIB aktif: This screenshot shows a search result for a business profile. The search bar at the top has 'NIB' entered. Below it, a table displays one row of data:

Nomor Induk Berusaha	Nama Pelaku Usaha	NPWP	Alamat	No. Telp Perusahaan	Jenis Perusahaan	Status NIB	Aksi
000220000	DANERGIDA ZAMSID NUSANTARA	-603.000	Pekalongan Graha Kencana Fr09/020.000 Tanjakan Kec. Pamekasan Jawa Timur	0853556	Perseroan Terbatas (PT)	Aktif	<button>DETAIL</button>

Gambar 2. NIB tidak aktif: This screenshot shows a search result for a business profile. The search bar at the top has 'NIB' entered. Below it, a table displays one row of data, which is identical to the one in Gambar 1:

Nomor Induk Berusaha	Nama Pelaku Usaha	NPWP	Alamat	No. Telp Perusahaan	Jenis Perusahaan	Status NIB	Aksi
000220000	DANERGIDA ZAMSID NUSANTARA	-603.000	Pekalongan Graha Kencana Fr09/020.000 Tanjakan Kec. Pamekasan Jawa Timur	0853556	Perseroan Terbatas (PT)	Aktif	<button>DETAIL</button>

Both screenshots also include a message at the bottom right: 'Tidak ada data untuk ditampilkan saat ini.' (No data available to display at this time.)

Gambar 1. NIB aktif

Gambar 2. NIB tidak aktif

Namun, berdasarkan observasi awal tingkat pembaruan data NIB oleh pelaku IKM masih rendah dengan 31,95% NIB berstatus tidak aktif yang mengindikasikan kesenjangan antara sistem dengan praktik di lapangan.

3. Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha mencerminkan adanya kemajuan yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan manajerial dan daya saing ekonomi perusahaan. Peningkatan daya saing ini berdampak langsung pada bertambahnya pendapatan sehingga usaha mampu bertahan dan bersaing di pasar. Indikator perkembangan usaha umumnya dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan, penambahan tenaga kerja, peningkatan laba serta kenaikan nilai aset. Ketika indicator tersebut terpenuhi, maka usaha dapat dikategorikan berkembang (Inggarwati & Kaudin, 2012). Hal serupa juga berlaku pada UMKM atau IKM, di mana perkembangan usaha terutama diukur dari peningkatan pendapatan yang diterima (Sumardi & Zulpahmi, 2017). Selain itu, kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi permintaan pasar menjadi tolok ukur penting dalam menilai pertumbuhan UMKM atau IKM (Purwanti, 2012). Pertumbuhan ini tercermin dari meningkatnya pendapatan, bertambahnya jumlah tenaga kerja, serta semakin luasnya jumlah konsumen. Dengan demikian, aspek sumber daya manusia, keuntungan usaha, dan pengelolaan aset menjadi indikator utama dalam menilai perkembangan usaha kecil. Perkembangan usaha tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, seperti karakteristik wirausaha, kecukupan modal dan strategi pemasaran. Modal usaha memegang peranan fundamental karena menjadi dasar dalam membangun serta memperluas skala usaha. Besar kecilnya usaha sangat bergantung pada kemampuan pengusaha dalam mengelola modal yang dimiliki (Purwanti, 2012). Perspektif Resource Based View menjelaskan bahwa kemajuan maupun kemunduran perusahaan ditentukan oleh kekuatan dan kelemahan sumber daya internal (Paulus & Murdapa, 2016). Sumber daya yang dikelola dengan kapabilitas yang baik dapat diubah menjadi keunggulan ekonomi dan menciptakan daya saing berkelanjutan (Lacity & Willcocks, 2008).

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metodologi

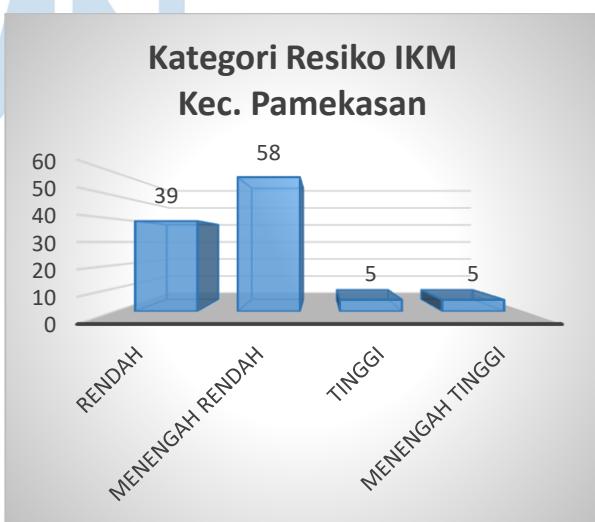
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif menggunakan bahasa dan kata. Dalam penelitian kualitatif, konteks asli menjadi sangat penting dan berbagai metode alamiah digunakan untuk melaksanakan

penelitian ini (Moleong, 2014). Data kualitatif dari wawancara, dokumentasi dan observasi dianalisis menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014) yang terdiri dari tiga tahap dengan bantuan software QDA Miner Lite: 1. REDUKSI DATA - Transkrip wawancara dan catatan lapangan diimpor ke QDA Miner Lite - Dilakukan open coding untuk mengidentifikasi konsep awal - Data disortir berdasarkan tema: (a) faktor penyebab NIB tidak aktif; (b) pola eskalasi IKM; (c) hambatan scale up; (d) kebutuhan pendampingan – Kode tersebut dikategorikan menggunakan axial coding untuk membentuk kategori tematik; 2. PENYAJIAN DATA - Data disajikan dalam: (a) matriks kategorisasi masalah; (b) network diagram hubungan antar-faktor; (c) frequency analysis untuk pola dominan - QDA Miner Lite digunakan untuk visualisasi word cloud, code co-occurrence dan coding frequency; 3. PENARIKAN KESIMPULAN DAN VERIFIKASI - Pola dan hubungan antar-tema diidentifikasi melalui selective coding - Verifikasi dilakukan melalui: a) Triangulasi sumber: membandingkan data dari pelaku IKM, pemerintah dan dokumen; b) Triangulasi metode: cross-check antara wawancara, observasi dan dokumentasi; c) Member checking: konfirmasi temuan kepada 10 informan kunci - Credibility diperkuat dengan peer debriefing bersama peneliti lain dan praktisi IKM.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan IKM Kabupaten Pamekasan (2024) distribusi IKM berdasarkan status NIB menunjukkan bahwa Kecamatan Kota Pamekasan memiliki konsentrasi tertinggi IKM dengan NIB tidak aktif (Gambar 1). Dari total 1.371 IKM di seluruh kabupaten 23,05% terkonsentrasi di Kecamatan Kota Pamekasan sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan. Pada (Gambar 2) menunjukkan klasifikasi IKM berdasarkan tingkat risiko usaha, dimana mayoritas IKM Kecamatan Kota Pamekasan 36,45% termasuk kategori risiko rendah. Kategori risiko ini merujuk pada kompleksitas perizinan dan potensi dampak lingkungan berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penelitian ini memfokuskan pada IKM di Kecamatan Kota Pamekasan karena: (1) Konsentrasi IKM tertinggi; (2) Representasi berbagai jenis usaha kreatif; (3) Aksesibilitas untuk pengumpulan data; dan (4) Potensi replikasi temuan ke kecamatan lain. Fokus pada IKM risiko rendah memungkinkan peneliti mengeksplorasi akar permasalahan administratif dan manajerial tanpa bias dari kompleksitas teknis perizinan khusus.



Gambar 3. Sebaran NIB IKM Pamekasan



Gambar 4. Kategori Risiko IKM Pamekasan

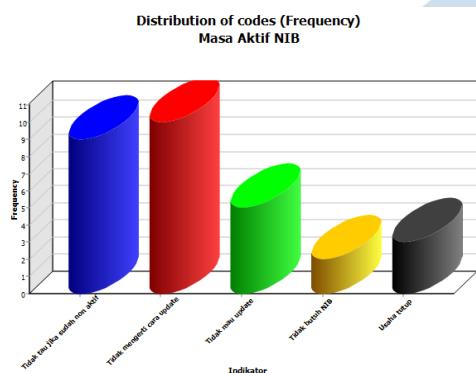
Data : Rekraf dan IKM Kabupaten Pamekasan (2024).

2.2 Profil Responden

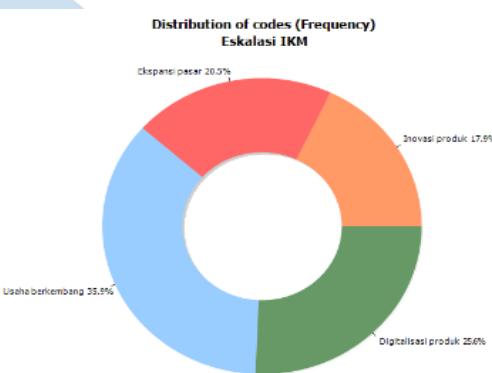
Populasi penelitian adalah seluruh IKM terdaftar di Kecamatan Pamekasan dengan NIB tidak aktif, berjumlah 107 unit usaha (Disperindag, 2024). Dari populasi tersebut, dipilih 39 IKM sebagai sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: 1. NIB berstatus tidak aktif minimal 6 bulan; 2. Terklasifikasi risiko rendah berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia); 3. Masih operasional dan dapat dihubungi; dan 4. Bersedia menjadi informan penelitian. Pemilihan IKM risiko rendah bertujuan untuk fokus pada permasalahan administratif dan manajerial, bukan pada kompleksitas teknis produksi atau perizinan khusus. Jumlah sampel 39 IKM (36% dari populasi) dianggap memadai karena telah mencapai saturasi data pada informan ke-35, dimana informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak ada temuan baru yang signifikan

3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa IKM yang menjadi objek penelitian, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut :



Gambar 5. Masa aktif NIB



Gambar 6. Eskalasi IKM

Sumber : Data diolah

Pada gambar 3, temuan dominan menunjukkan 34,53% IKM tidak memahami prosedur pembaruan NIB, mengindikasikan kesenjangan literasi digital dan administratif di kalangan pelaku IKM. Analisis lebih lanjut menggunakan QDA Miner Lite mengidentifikasi tiga subtema dalam kategori "ketidakpahaman": a) Kompleksitas Sistem OSS (disebutkan 18 dari 39 informan): "Saya sudah coba buka websitenya, tapi bingung mau ngeklik yang mana. Ada banyak menu, takut salah. Akhirnya saya tinggalin aja." (Informan IKM-07, batik) b) Keterbatasan Akses Internet dan Perangkat (12 informan): "Di sini sinyal sering lemot, Pak. Kadang loading doang sampai error. Belum lagi HP saya jadul, aplikasinya suka nge-hang." (Informan IKM-23, kerajinan bambu) c) Tidak Ada Pendampingan Teknis (15 informan): "Dulu pas bikin NIB pertama ada yang bantuin dari dinas. Sekarang disuruh update sendiri tapi gak ada yang ngajarin." (Informan IKM-15, makanan olahan). Saya buka usaha batik ini sudah 15 tahun, Pak. Dulu pernah bikin NIB pas ada sosialisasi dari dinas. Tapi sekarang katanya NIB saya sudah mati. Saya bingung harus gimana. Mau tanya ke dinas, jauh. Mau cari info di internet, gak ngerti caranya. Ya sudah, saya jalani aja usaha seperti biasa. Alhamdulillah lancar-lancar aja kok, pelanggan tetap ada, produksi jalan terus." (Informan IKM-12, pengrajin batik,

15 tahun beroperasi) "Kalau mau jujur, saya sebenarnya tahu NIB saya sudah tidak aktif. Tapi untuk perpanjang itu ribet, Pak. Harus upload ini itu, laporan keuangan lah, foto produk lah. Sementara usaha saya kan kecil-kecilan, omzet naik turun. Saya gak sempat bikin pembukuan yang rapi. Daripada ribet, ya saya biarkan saja. Lagian selama ini gak ada inspeksi atau penertiban juga." (Informan IKM-28, makanan olahan, 8 tahun beroperasi) Kutipan diatas mengkonfirmasi temuan kuantitatif sekaligus memberikan konteks mendalam tentang rasionalitas pelaku IKM dalam mengabaikan status NIB. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ricky selaku pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, terdapat beberapa alasan mengapa IKM tidak memperpanjang atau mengurus NIB, diantaranya : 1. Ketidaktahuan pelaku usaha bahwa NIB lama mereka sudah tidak aktif; 2. Anggapan bahwa usaha tetap dapat berjalan tanpa NIB; 3. Keterbatasan pemahaman terhadap sistem pembaruan NIB; 4. Beban administratif yang dirasa cukup berat; serta 5. Pola pikir bahwa pengurusan NIB hanya dilakukan apabila ada bantuan dari pemerintah. Pola ini menunjukkan bahwa "ketidakpahaman" bukan semata-mata masalah kapasitas individu, tetapi refleksi dari: (1) desain sistem yang tidak user-friendly untuk pengguna dengan literasi digital terbatas, (2) infrastruktur teknologi yang belum merata, dan (3) absennya mekanisme pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Temuan ini sejalan dengan studi yang mengidentifikasi gap teknologi sebagai hambatan utama IKM (Tambunan, 2021), namun penelitian ini memperdalam dengan menunjukkan bahwa gap tersebut bukan hanya pada teknologi produksi, tetapi juga pada teknologi administratif yang justru menjadi gerbang akses IKM terhadap ekosistem formal.

Pada gambar 4, hasil penelitian menunjukkan adanya eskalasi positif pada IKM di Kabupaten Pamekasan, yang ditandai oleh usaha yang terus berkembang (35,9%), ekspansi pasar (20,5%), inovasi produk (17,9%) serta penerapan digitalisasi (25,6%). Kondisi ini menunjukkan semangat pelaku IKM untuk terus meningkatkan kualitas dan skala usahanya, yang pada akhirnya memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Namun demikian, potensi ini akan lebih optimal apabila mendapat dukungan aktif dari pemerintah daerah, khususnya terkait permasalahan NIB yang tidak aktif. Menurut Bapak Ricky juga, tidak diperpanjangnya NIB menimbulkan berbagai dampak negatif bagi IKM, seperti : 1. Status usaha yang tidak legal secara hukum; 2. Kesulitan dalam mengakses permodalan; 3. Terhambatnya pengembangan usaha; serta 4. Tidak terdatanya usaha dalam basis data pemerintah daerah. Akibatnya, IKM berpotensi tidak mendapatkan manfaat dari berbagai program pemerintah yang tersedia.

Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya peran pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk lebih aktif dalam melakukan pendataan, evaluasi, dan monitoring terhadap IKM yang memiliki permasalahan NIB. Optimalisasi fungsi NIB sebagai basis data daerah diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program eskalasi usaha yang lebih tepat sasaran sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan IKM dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji dua isu utama dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Pamekasan, yaitu problematika ketidakaktifan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pola eskalasi usaha IKM dalam kondisi tersebut. Temuan empiris menunjukkan bahwa persoalan NIB tidak aktif 65,57% didominasi oleh kendala teknis dan

administrative (34,53% tidak memahami prosedur pembaruan; 31,04% tidak mengetahui status NIB-nya), khususnya rendahnya pemahaman pelaku usaha 24,12% terhadap prosedur pembaruan dan ketidaktahuan atas status NIB mereka. Faktor ini mencakup lebih dari separuh responden, sementara sisanya disebabkan oleh faktor motivasional, seperti rendahnya minat untuk memperbarui NIB atau persepsi bahwa legalitas formal tidak memberikan manfaat langsung bagi kelangsungan usaha. Hasil ini menegaskan bahwa masalah utama bukan sekadar rendahnya kesadaran hukum, melainkan adanya ketidaksesuaian antara desain sistem perizinan digital (OSS) dengan kapasitas dan realitas operasional IKM local. Di sisi lain, penelitian ini mengungkap paradoks penting dalam dinamika IKM. Meskipun mayoritas responden tidak memiliki NIB aktif, sebagian besar IKM tetap menunjukkan indikator eskalasi usaha yang positif sebesar 92%, seperti pertumbuhan berkelanjutan (35,9%), adopsi teknologi digital (25,6%), perluasan pasar (20,5%) dan inovasi produk (17,9%). Fenomena ini menantang asumsi konvensional bahwa formalisasi usaha merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan IKM.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku IKM di Pamekasan banyak mengandalkan mekanisme informal termasuk modal sosial, jaringan local dan reputasi sebagai strategi bertahan dan berkembang di luar sistem formal pemerintah. Namun, ketergantungan pada mekanisme informal ini menimbulkan konsekuensi struktural, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Pemerintah kehilangan visibilitas terhadap kondisi riil IKM, yang berpotensi menyebabkan ketidaktepatan alokasi program dan sumber daya. Sementara itu, IKM berisiko terjebak dalam kondisi pertumbuhan terbatas, di mana mereka mampu berkembang hingga titik tertentu tetapi kesulitan melakukan peningkatan skala usaha akibat keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, sertifikasi dan kemitraan institusional.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan memperluas konsep institutional voids ke dalam konteks digitalisasi pemerintahan (Khanna & Palepu, 2010). Berbeda dari literatur sebelumnya yang menekankan kekosongan institusi pasar konvensional, studi ini menunjukkan bahwa kekosongan institusional juga dapat muncul dalam tata kelola digital ketika infrastruktur teknologi tersedia, tetapi tidak dapat diakses atau dimanfaatkan secara efektif oleh pelaku usaha dengan kapasitas terbatas. Kondisi ini melahirkan apa yang disebut sebagai digital institutional void, yang menuntut pendekatan kebijakan lebih substantif daripada sekadar penyediaan platform digital. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif database governance ke dalam kajian pengembangan IKM, dengan menegaskan bahwa database bukan sekadar alat administratif, melainkan instrumen struktural yang menentukan inklusi atau eksklusi IKM dalam ekosistem ekonomi formal (Ruslan et al., 2025; Tambunan, 2021). Studi ini juga mengusulkan model eskalasi IKM berbasis dual-track, yaitu jalur formal melalui legalitas dan program pemerintah serta jalur informal melalui jaringan sosial dan mekanisme pasar tradisional, yang menjelaskan mengapa pertumbuhan tanpa NIB tetap mungkin tetapi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dari sisi praktis, penelitian ini menawarkan implikasi kebijakan yang konkret. Pertama, perlunya model intervensi berlapis yang mencakup langkah jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi permasalahan NIB secara sistematis; Kedua, pentingnya pengembangan kerangka monitoring berbasis data yang mampu memetakan status NIB, pola eskalasi usaha, serta hambatan spesifik yang dihadapi IKM sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti; Ketiga, penelitian ini menekankan urgensi pendekatan digitalisasi yang inklusif, dengan menempatkan peningkatan literasi digital pelaku usaha sebagai prasyarat utama sebelum implementasi transformasi digital pemerintahan secara lebih luas.

Penelitian ini juga secara reflektif mengakui keterbatasannya. Penggunaan desain cross-sectional membatasi kemampuan penelitian dalam menangkap dinamika perubahan

status NIB dan eskalasi usaha dari waktu ke waktu, sehingga hubungan kausal tidak dapat ditetapkan secara definitif. Selain itu, fokus geografis yang hanya mencakup Kecamatan Pamekasan serta pembatasan pada IKM kategori risiko rendah membatasi tingkat generalisasi temuan. Kendati demikian, keterbatasan ini justru membuka ruang bagi penelitian lanjutan berbasis data longitudinal dan cakupan wilayah yang lebih luas untuk menguji keberlanjutan temuan dan memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara legalitas, tata kelola digital dan pertumbuhan IKM.

4.2 Implikasi/Batasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan pengumpulan data pada satu periode waktu (Juni–Agustus 2025). Pendekatan ini memungkinkan pemotretan kondisi IKM pada satu titik waktu, namun tidak mampu menangkap dinamika temporal yang bersifat longitudinal. Secara khusus, desain ini tidak dapat merekam perubahan status Nomor Induk Berusaha (NIB) dari waktu ke waktu, proses eskalasi usaha IKM secara bertahap, maupun dampak jangka panjang legalitas formal terhadap keberlanjutan usaha.

Implikasi metodologis dari desain tersebut cukup signifikan. Pertama, penelitian ini tidak dapat menetapkan hubungan kausal secara definitif antara status NIB dan pertumbuhan usaha. Meskipun data menunjukkan bahwa sebagian besar IKM dengan NIB tidak aktif tetap mengalami pertumbuhan, temuan ini bersifat korelasional. Tidak dapat dipastikan apakah pertumbuhan terjadi terlepas dari status NIB atau justru status NIB dibiarkan tidak aktif karena pelaku usaha telah merasa mandiri dan tidak membutuhkan intervensi pemerintah. Kedua, penelitian ini belum mampu menjawab apakah IKM yang saat ini berkembang tanpa legalitas formal akan tetap berkelanjutan dalam jangka panjang atau justru berpotensi mengalami stagnasi ketika berhadapan dengan hambatan akses pasar formal dan pembiayaan institusional. Ketiga, pola permasalahan NIB yang teridentifikasi seperti rendahnya pemahaman prosedur dan ketidaksadaran terhadap status NIB bersifat kontekstual dan berpotensi berubah seiring perkembangan kebijakan, intensitas sosialisasi, maupun regenerasi pelaku usaha. Oleh karena itu, studi longitudinal atau panel data direkomendasikan untuk menguji kembali hubungan kausal dan dampak jangka panjang yang diindikasikan dalam penelitian ini.

Selain keterbatasan desain waktu, penelitian ini juga memiliki batasan geografis yang signifikan. Fokus penelitian hanya mencakup IKM di Kecamatan Pamekasan, yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan kabupaten. Dari total 13 kecamatan, hanya satu kecamatan yang dijadikan lokasi penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan konsentrasi IKM yang tinggi, keterbatasan sumber daya penelitian, serta asumsi bahwa wilayah pusat kota merepresentasikan kondisi terbaik karena memiliki akses infrastruktur dan layanan publik yang relatif optimal. Konsekuensinya, temuan penelitian tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke wilayah rural atau pinggiran yang memiliki keterbatasan akses digital, tingkat literasi teknologi yang lebih rendah, jarak yang lebih jauh dari layanan pemerintah, serta struktur usaha yang berbeda. Bahkan, jika permasalahan NIB sudah muncul di wilayah pusat, besar kemungkinan tantangan tersebut lebih kompleks di wilayah perifer (wilayah pinggiran).

Keterbatasan lain berkaitan dengan karakteristik sampel usaha. Penelitian ini hanya mencakup IKM dengan kategori risiko rendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Mayoritas responden bergerak di sektor kerajinan, makanan olahan skala kecil, dan batik, yang tidak memerlukan izin teknis lanjutan seperti AMDAL atau Izin Operasional Industri. Pembatasan ini dilakukan untuk menyederhanakan kompleksitas analisis dan memfokuskan kajian pada hambatan

administratif-manajerial. Namun, implikasinya adalah temuan penelitian tidak merepresentasikan pengalaman IKM risiko menengah dan tinggi, yang menghadapi prosedur perizinan lebih kompleks. Kelompok IKM tersebut dapat memiliki dinamika yang berbeda baik dalam hal motivasi mempertahankan legalitas, kapasitas manajerial, maupun beban administratif sehingga generalisasi hasil penelitian ke seluruh spektrum IKM harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

5. ACKNOWLEDGEMENT

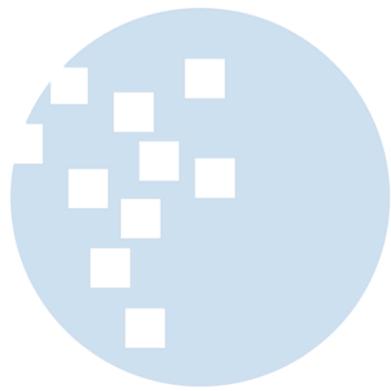
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada beberapa pihak yang telah membantu baik secara finansial maupun non finansial sehingga penelitian ini dapat terlaksana, diantaranya : 1. Kemdiktisantek melalui skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) dengan nomor kontrak 128/C3/DT.05.00/PL/2025 dan nomor kontrak turunannya 036/LL7/DT.05.00/PL/2025; serta 2. LPPM Universitas Madura dengan nomor kontrak 156/E.02/UNIRA-LPPM/VI/2025

6. REFERENSI

- Abbas, B., Razak, A., Sabilalo, M. A., Supriaddin, N., Nur, M., Asraf, Hakim, A., Tambunan, R., & Yuana, I. (2023). Efforts To Improve Human Resources And Competitiveness Of Small And Medium Enterprise Through Quality Management Training And Management Of SME Centers. *MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 205–210.
- Abu, N., da Silva, F. P., & Vieira, P. R. (2025). Government support for SMEs in the Fintech Era: Enhancing access to finance, survival, and performance. *Digital Business*, 5(1). <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2024.100099>
- Aruvali, T., Rauch, E., Matt, D. T., & Francalanza, E. (2025). ScienceDirect SMEs ' Requirements for Resilient Cyber-Physical Production System. *Procedia Computer Science*, 253, 1611–1620. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.01.223>
- Ayuni, R. (2024). *Pengaruh Modal Dan Pemanfaatan E-Commerce Terhadap Pendapatan Industri Kecil Menengah Binaan DISDAGKOPERIN Kabupaten Rejang Lebong*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Retrieved from *Statistik Ekonomi Kreatif*. bps.go.id
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025a). *Ekonomi Kabupaten Pamekasan tahun 2024 Tumbuh Positifsebesar 4,88 persen*. <https://pamekasankab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/04/08/88/ekonomi-kabupaten-pamekasan-tahun-2024-tumbuh-positifsebesar-4-88-persen-.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pamekasan Menurut Lapangan Usaha 2020–2024*. <https://pamekasankab.bps.go.id/id/publication/2025/04/11/2b54308d169cb1e0f6b6e5ec/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-pamekasan-menurut-lapangan-usaha-2020-2024.html>
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Fauzan, A. M. (2025). *Kemenperin catat industri kecil menengah serap 13,11 juta tenaga kerja*. ANTARA : Kantor Berita Indonesia.

- https://www.antaranews.com/berita/4622134/kemenperin-catat-industri-kecil-menengah-serap-1311-juta-tenaga-kerja?utm_source=chatgpt.com
- Febrila, T., & Eriyanti, F. (2025). Pengaruh Pelatihan Terhadap Etos Kerja Pelaku IKM Di Kabupaten Pesisir Selatan. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 149–157.
- Fera, P., Meles, A., Moscariello, N., Raffaele, L., & Ricciardi, G. (2025). Unlocking financing opportunities : The impact of the ELITE Program on SMEs ' Financing. *Finance Research Letters*, 79(October 2024), 107207. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107207>
- Inggarwati, K., & Kaudin, A. (2012). Peranan Faktor-Faktor Individual dalam Mengembangkan Usaha Studi Kuantitatif pada Wirausaha Kecil di Salatiga. *International Research Journal of Business Studies*, 3(2).
- Kano, K., Choi, L. K., Riza, B. S., & Octavyra, R. D. (2022). Implications of Digital Marketing Strategy The Competitive Advantages of Small Businesses in Indonesia. *Startpreneur Business Digital (SABDA)*, 1(1), 44–62.
- Kemenparekraf. (2020). *Infografis Data Statistik Indikator Makro Pariwisata & Ekonomi Kreatif*. <https://kemenparekraf.go.id/statistik-ekonomi-kreatif>
- Khanna, T., & Palepu, K. G. (2010). *Winning in Emerging Markets: A Road Map for Strategy and Execution*. Harvard Business Review Press. <https://doi.org/10.1177/0974173920100316>
- Lacity, M., & Willcocks, L. (2008). *Information Systems and Outsourcing: Studies in Theory and Practice*. Springer International Publishing.
- Mareta, N., Elpanso, E., Mellita, D., & Noviardy, A. (2025). Pengaruh Digital Marketing Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Industri Kecil Menengah (IKM) Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus IKM Jami ' ah Riqzi Herbal di Daerah Plaju). *JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN BANGSA*, 1(8), 1644–1650.
- Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications Ltd.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2023). *OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2023*. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2023_342b8564-en.html
- Paulus, A. L., & Murdapa, P. S. (2016). Pemanfaatan Teori Resource-Based View Pada Ritel Minimarket : Implikasinya Terhadap Strategi Dan Keunggulan Bersaing. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 16(2), 215. <https://doi.org/10.17970/jrem.16.160204.id>
- Purwanti, E. (2012). Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga. *Among Makarti*, 5(9), 13–28.
- Qisthani, N. N., Hidayatuloh, S., Wahyudi, L., & Arifin, M. (2023). Re-branding, Pendampingan Pendaftaran Merek dan Pengelolaan Sosial Media pada IKM Batik Keraton Pekalongan. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(2), 714–728. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i2.2617>
- Ruslan, D., Simanjuntak, Y., Maulana, J., & Sitanggang, N. (2025). Optimalisasi Inovasi Teknologi untuk Mendorong Daya Saing Industri Kecil dan Menengah. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 663–668.
- Sulistyo, M. T., Sari, W. S., Nugraini, S. H., Muhammad, M. Z., & Emmerig, R. (2023). Pemanfaatan Sumberdaya IKM dalam Meningkatkan Produktivitas dan Pemasaran Produk Melalui Transformasi Digital Masyarakat Desa. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(2), 283–288. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i2.11874>
- Sumardi, & Zulpahmi. (2017). peran baitul maal wat tamwil husnayain terhadap perkembangan

- usaha mikro kecil dan menengah. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(1), 68–89. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Tambunan, T. T. H. (2021). *MSMEs In Indonesia : Development, Obstacles, and Challenges* (1st ed.). Prenada.
- Tasya, R., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). Implementasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (Ikm) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3), 42–47. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i3.2317>
- Zainuddin, Z., Hasibuan, S., & Kusumah, L. H. (2024). Strategi Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Pada Sentra Industri Furnitur Di Kabupaten Morowali Menggunakan Metode (SWOT-PDCA). *JISI: Jurnal Integrasi Sistem Industri*, 11(1), 9. <https://doi.org/10.24853/jisi.11.1.9-20>
- Zare, L., Benedini, B., Ali, M. Ben, Rauch, E., & Salimbeni, S. (2025). Opportunities and Barriers for Implementing Human-Centric Manufacturing in SMEs : Results from Focus Group Workshops in Argentina. *Procedia Computer Science*, 253(2024), 1452–1461. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.01.207>



UMN